

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberikan kekuasaan untuk mengatur kepentingan Bangsa dan Negara. Adanya pemerintah dibentuk untuk menjalankan aktivitas publik sehingga lembaga pemerintah tidak mencari laba. Lembaga tertinggi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur bangsa dan negara merupakan lembaga pemerintah. Dalam mencapai pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien maka pemerintah terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang saling berkoordinasi satu sama lain. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan menjalankan salah satu agenda pembangunan nasional yaitu pembangunan daerah. Setiap daerah yang ada di Indonesia diharapkan untuk terus membangun daerahnya ke arah yang lebih baik serta dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pembangunan yang sedang dilaksanakan ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien menuju ke arah perubahan yang lebih baik (Putry, 2008).

Semenjak reformasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan bergulir serta dengan berkembangnya perekonomian yang semakin luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka pemerintah pusat memberi kesempatan dan wewenang kepada pemerintah daerah (Baihaqi, 2011). Perubahan yang cukup fundamental ini berdampak pada mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Demi

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat maka pemerintah memberikan otonomi yang luas kepada daerah, dimana hal ini merupakan wujud nyata dari UU Nomor 32 Tahun 2004 yang direvisi dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Baihaqi (2011) pasal (1) ayat (5) menjelaskan bahwa Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan peran pemerintah pusat dalam pelaksanaan desentralisasi bertugas untuk memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan dari otonomi daerah.

Di bidang ekonomi, otonomi daerah disatu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah dan dilain pihak dibukanya peluang bagi pemerintah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerah (Setyawan, 2004). Pelaksanaan otonomi daerah menuntut berbagai pemerintah daerah di Indonesia untuk lebih mandiri dalam mendanai keuangan daerah serta menjalankan pemerintahannya. Setiap daerah harus mampu mengelola dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk menjunjung keberhasilan otonomi daerah, diantaranya: sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), kemampuan mengelola keuangan daerah, kondisi sosial budaya masyarakat, dan kemampuan manajemen (Halim, 2004).

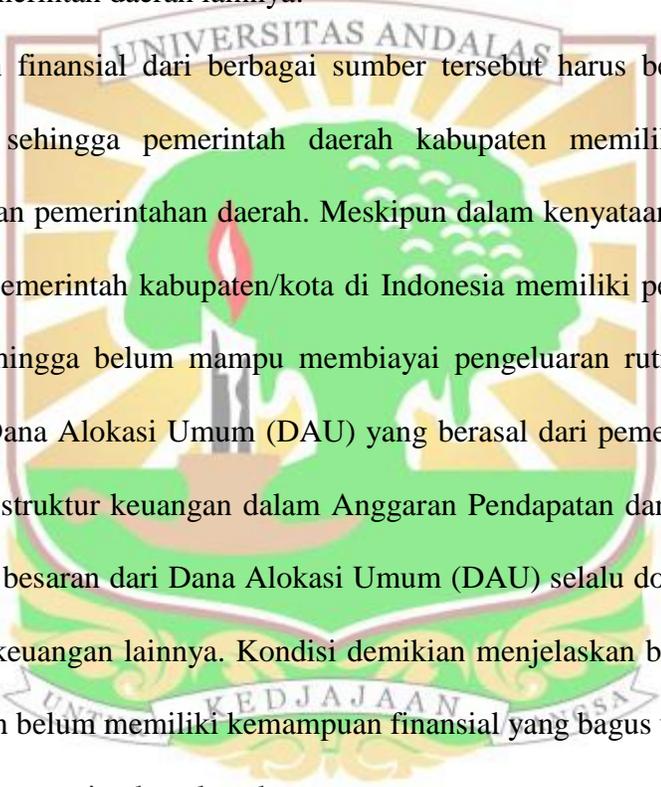
Sangat penting untuk memperhatikan bagaimana sistem pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal itu, analisis pertumbuhan dan kontribusi penerimaan pendapatan daerah terhadap realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan informasi yang dapat digunakan untuk menilai apakah pemerintah berhasil mengelola keuangannya dengan baik dan membuat kebijakan yang tepat dalam pengelolaan keuangan daerah terutama pada pendapatan, serta memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Analisis pertumbuhan dan kontribusi penerimaan pendapatan daerah terhadap realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dari satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat (Halim, 2007). Informasi yang diperoleh dari APBD secara garis besar sudah menerangkan bagaimana kondisi dari pemerintah daerah dalam membiayai pemerintahannya sendiri serta ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Penerimaan daerah atau yang sering disebut dengan pendapatan daerah merupakan sumber pendanaan bagi penyelenggaraan pemerintah daerah. Dimana pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selain itu juga bersumber dari Dana Perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Sumber pendapatan daerah yang lain adalah dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu terdiri dari pendapatan hibah, bagi hasil pajak dari propinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.



Kekuatan finansial dari berbagai sumber tersebut harus benar-benar digali secara optimal sehingga pemerintah daerah kabupaten memiliki modal untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Meskipun dalam kenyataan sampai saat ini, sebagian besar pemerintah kabupaten/kota di Indonesia memiliki pendapatan daerah yang minim, sehingga belum mampu membiayai pengeluaran rutinnya dan masih mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang berasal dari pemerintah pusat. Hal ini terlihat pada struktur keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimana besaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) selalu dominan dibanding dengan sumber keuangan lainnya. Kondisi demikian menjelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten belum memiliki kemampuan finansial yang bagus untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kabupaten Lima Puluh Kota adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberikan otonomi daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah tersebut serta menghasilkan pemerataan pertumbuhan perekonomian. Berikut

adalah gambaran Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2012-2016:

Tabel 1.1
Tabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2012-2016

Tahun	PAD	DAU
2012	24.936,55	550.759,74
2013	33.095,12	632.930,79
2014	52.829,35	700.183,21
2015	62.932,79	725.615,82
2016	68.060,27	760.431,50

Sumber: DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota

Dari data diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) di Kabupaten Lima Puluh Kota cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dari periode 2012-2016. Data keuangan tahun anggaran

2012 menunjukkan bahwa realisasi PAD sebesar Rp. 24.936,55 sementara untuk DAU sebesar Rp. 550.759,74. Pada tahun anggaran 2013 PAD yang terealisasi sebesar Rp. 33.095,12 sedangkan DAU sebesar Rp. 632.930,79. Tahun anggaran 2014 menunjukkan PAD yang terealisasi sebesar Rp. 52.829,35 sementara DAU sebesar Rp. 700.183,21. Tahun anggaran 2015 PAD terealisasi sebesar Rp. 62.932,79 dan DAU sebesar Rp. 725.615,82. Demikian juga yang terjadi pada tahun anggaran 2016 juga menunjukkan realisasi PAD sebesar Rp. 68.060,27 sedangkan dari DAU sebesar Rp. 760.431,50. Jadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kabupaten Lima Puluh Kota masih mangandalkan pembiayaan dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan terutama Dana Alokasi Umum.

Alasan penulis memilih Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai objek penelitian karena sebagai salah satu kabupaten terpadat kependudukannya dan salah satu daerah yang masih jarang dijadikan objek penelitian terutama mengenai keuangan daerah seperti penelitian yang saya lakukan, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti pertumbuhan dan kontribusi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui beberapa rasio, serta ingin melihat bagaimana penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lima Puluh Kota setiap tahunnya dan sekaligus melihat tingkat ketergantungan Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap transfer atau suntikan dana dari pemerintah pusat.

Pada penelitian kali ini penulis berpedoman kepada beberapa penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh, Wahyuni (2009), Dhyni (2016), dan beberapa peneliti lainnya. Ruang lingkup untuk penelitian terdahulu juga beragam,

diantaranya melakukan analisis pertumbuhan dan kontribusi dana bagi hasil terhadap pendapatan daerah, analisis pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah, serta beberapa ruang lingkup penelitian lainnya. Pada penelitian terdahulu tersebut mereka menggunakan beberapa rasio dalam menilai pertumbuhan dan kontribusi pada pendapatan daerah diantaranya rasio efektivitas, pertumbuhan dan kontribusi. Ada beberapa rasio yang menunjukkan nilai positif atau baik dan ada beberapa rasio yang sering kali bernilai negatif atau rendah disetiap penelitian. Rasio tersebut menunjukkan pemerintah daerah masih kurang optimal dalam mengupayakan setiap potensi yang dimiliki daerah untuk memaksimalkan pendapatan daerah.

Pada penelitian kali ini penulis ingin merincikan lingkup penelitian kepada analisis pertumbuhan dan kontribusi penerimaan pada pendapatan daerah. Penulis bermaksud untuk melakukan pengolahan data pendapatan daerah dari periode 2012-2016 menggunakan analisis rasio yang terdiri dari: analisis pertumbuhan dari jumlah penerimaan, analisis tingkat pertumbuhan per-tahun, dan analisis kontribusi. Hasil dari data yang telah diolah selanjutnya dipergunakan sebagai tolak ukur dalam menganalisis penggunaan dari pendapatan daerah, sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatannya, kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, serta pertumbuhan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan analisis pertumbuhan dan kontribusi dari pendapatan daerah dengan judul penelitian **Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2012-2016.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, muncul beberapa masalah yang akan menjadi topik bahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pertumbuhan dan kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2012-2016?
2. Bagaimanakah pertumbuhan dan kontribusi penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2012-2016?
3. Bagaimanakah pertumbuhan dan kontribusi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2012-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka ditetapkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertumbuhan dan kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2012-2016.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertumbuhan dan kontribusi penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2012-2016.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertumbuhan dan kontribusi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2012-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Bagi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dan masukan untuk perkembangan kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah dalam segi pendapatan serta mengambil tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan.

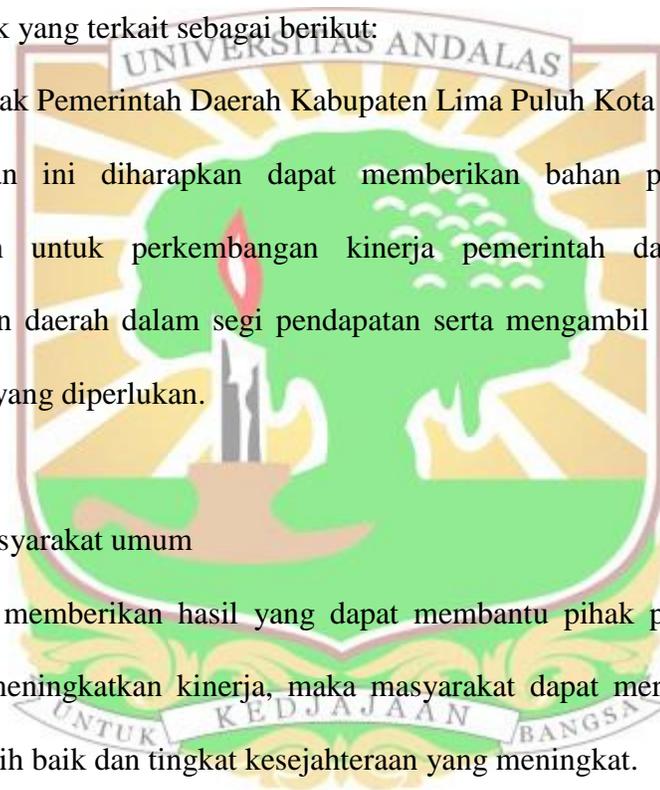
2. Bagi masyarakat umum

Dengan memberikan hasil yang dapat membantu pihak pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja, maka masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih baik dan tingkat kesejahteraan yang meningkat.

3. Bagi dunia akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya di bidang akuntansi sektor publik.

4. Bagi penulis



Penelitian ini bermanfaat dalam menambah pengetahuan mengenai keuangan daerah khususnya pada pengelolaan keuangan daerah itu sendiri serta sebagai syarat penyelesaian pendidikan S1 pada jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan terbatas pada analisis pertumbuhan dan kontribusi penerimaan pendapatan daerah pada Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2012-2016.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai isi dari skripsi ini, pembahasan dilakukan secara komprehensif dan sistematis meliputi:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan/ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan isi dari penelitian ini.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengenai Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah, Keuangan Daerah dan

Ukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah yang terdapat dalam penelitian ini.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan objek penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis data, dan tahap pengujian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB IV : Analisis dan Pembahasan

Bab ini membahas analisis pengolahan data serta pembahasannya yang merupakan interpretasi dari hasil pengolahan data tersebut. Interpretasi hasil penelitian ini akan memberikan jawaban atas permasalahan dari penelitian ini.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan serta keterbatasan dari penelitian yang dilakukan dan juga saran-saran untuk referensi penelitian selanjutnya.

